

Pentingnya Hak Pemilihan Umum dalam Proses Demokratisasi

Devina Cahya Kamila¹, Anggita Dita Sari², Andika Putra Kamajaya³, Gamaliel Yudo Widiyanto⁴, Arvi Octaviana⁵, Unggul Pamekas⁶, Kuswan Hadji⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Tidar Magelang

e-mail: devinacahya05@gmail.com, anggidaditasari@gmail.com, kuswanhadji@untidar.ac.id

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Abstract : Elections or general elections have an important role in determining the future of the nation by electing leaders and officials who are directly elected by the people and for the people. Democracy is the main factor in holding elections as people are free to choose according to their conscience without any coercion or threat. However, the process of implementing elections in Indonesia still experiences obstacles such as the white group (golput) who choose to give up their voting rights in determining the future of the nation. Therefore, we provide solutions and suggestions that can be used to reduce the percentage of the white group by means of election education, voting training, encouraging political parties to be more active, using the media to publish information about elections, election monitoring, research and opinion surveys as described in this research article that we wrote in the hope that it will create a movement to suppress white groups who throw away their voting rights. Then, in compiling this research article, we used an empirical juridical qualitative research method by raising two problem formulations that are problems in the current era. With the results of this research article, hopefully it can help you and can be a source of reference in preparing research that has the same aims and objectives.

Keywords : Elections, Democracy, White Group

Abstrak : Pemilu atau pemilihan umum memiliki peran penting untuk menentukan masa depan bangsa dengan dipilihnya pemimpin dan para pejabat yang langsung dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana rakyat bebas memilih menurut hati nurani mereka tanpa adanya paksaan atau ancaman. Namun proses pelaksanaan pemilu di Indonesia masih mengalami hambatan seperti golongan putih (golput) yang memilih untuk membuang hak suara mereka dalam menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, kami memberikan solusi dan saran yang bisa di gunakan untuk menurunkan presentase golongan putih dengan cara edukasi pemilu, pelatihan memilih, mendorong partai politik untuk lebih aktif, memanfaatkan media untuk mempublikasikan informasi tentang pemilu, pemantauan pemilu, penelitian serta survey opini yang dijabarkan dalam artikel penelitian yang kami buat ini dengan harapan akan menciptakan sebuah pergerakan dalam menekan para golongan putih yang membuang hak suara mereka. Kemudian dalam menyusun artikel penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yuridis empiris dengan mengangkat dua rumusan masalah yang menjadi permasalahan di era saat ini. Dengan hasil artikel penelitian ini, semoga dapat membantu saudara serta bisa menjadi sumber referensi dalam menyusun sebuah penelitian yang memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Kata kunci : Pemilu, Demokrasi, Golongan Putih

PENDAHULUAN

Tujuan dari pemilu adalah untuk membangun sistem pemerintahan yang didasarkan pada kehendak rakyat, memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili semua kebutuhan dan keinginan masyarakat. Menjaga integritas demokrasi negara melalui pemilu yang adil, transparan, dan bebas adalah prioritas utama. Berbicara tentang demokrasi, itu adalah jenis pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan melalui pemilihan umum yang memilih wakil mereka. Prinsip-prinsip demokrasi termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak asasi

manusia, pemilihan umum yang bebas dan adil, dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang bergantung pada kehendak rakyat dan memungkinkan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Konsep negara kedaulatan rakyat terkait erat dengan demokrasi. Nama "demokrasi" berasal dari kata "demos", yang berarti "rakyat," dan "kratein", yang berarti "pemerintahan." Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki otoritas untuk mengatur pemerintahan dalam negara demokrasi. Ini sesuai dengan arti kedaulatan rakyat.

Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang memiliki prinsip kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan semua warga negaranya memiliki hak yang tidak bisa di hapuskan atau permanen dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menjadikan kehidupan lebih baik dari sebelumnya. Demokrasi mengajak warga negara untuk ikut serta dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum baik secara langsung atau tidak langsung. Demokrasi mengacu pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memiliki potensi adanya uji coba kebebasan politik secara bebas dan setara.

Di Indonesia sendiri, banyak orang yang dikenal sebagai "golongan putih" atau "golput". Istilah "golput" mengacu pada pemilih yang menolak untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan umum, yang menjadi perdebatan karena potensi pengaruh mereka terhadap hasil pemilu. Alasan untuk golput dapat beragam, mulai dari ketidakpuasan terhadap calon, sistem politik, hingga keputusan tentang perubahan yang diharapkan dari proses pemilihan. Akibatnya, "pentingnya hak pemilihan umum dalam proses demokratisasi" menjadi inspirasi bagi penulis untuk menyelidiki berbagai masalah yang berkaitan dengan pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif, di mana data deskriptif tentang informasi, baik yang disampaikan secara verbal maupun tertulis, serta perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian, diungkapkan secara mendalam. Data yang diperoleh dalam artikel penelitian ini berasal dari buku, artikel, dan sumber informasi yang di publish di laman web digital serta menggunakan google form. Dalam menyusun artikel ini kami menggunakan cara mengumpulkan para responden untuk memberikan jawaban atas pernyataan yang kami buat tentang artikel penelitian ini. Kemudian untuk metode penelitian yang kami gunakan

adalah metode yuridis empiris yaitu dengan mengkaji data yang didapat dilapangan dan menganalisis data yang di dapat dari sumber refrensi. Metode penelitian ini berfokus dalam fakta-fakta yang kami dapat dilapangan khususnya para responden yang telah mengisi google form kami tentang pernyataan yang kami gunakan sebagai acuan dalam menyusun artikel penelitian ini.

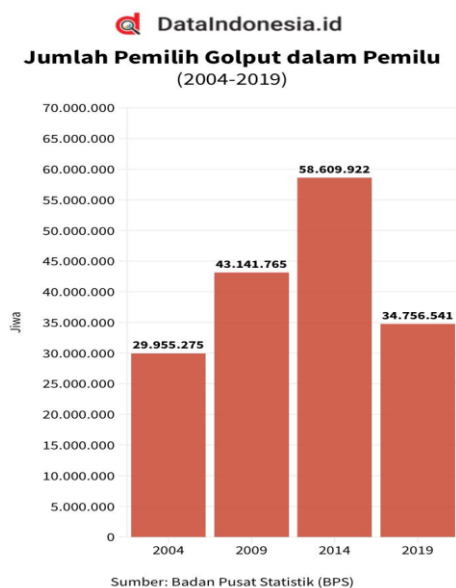
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip dasar negara demokratis adalah menghormati Konstitusi dan ideologi negara, dengan kebebasan dalam hak sosial dan politik sebagai landasan penting untuk mencapai tingkat demokrasi yang tinggi. Namun, tantangan muncul dalam memahami prinsip dan perlindungan hak warga negara sesuai dengan UUD 1945, serta dalam mengelola dinamika sosial politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 34,75 juta orang yang memilih untuk mengosongkan hak suaranya atau golongan putih (golput) dalam Pemilihan Umum pada tahun 2019. Angka tersebut sama dengan 18,02% dari total suara daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum pada tahun 2019 sekitar 192,77 juta jiwa. Jumlah pemilih yang memilih untuk mengosongkan hak suaranya pada

Pemilihan Umum tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 40,69% dari pada periode sebelumnya. Pada Pemilihan Umum tahun 2014, jumlah pemilih yang mengosongkan hak suaranya berkisar 58,61 juta orang dengan presentase 30,22%. Jawa Barat menjadi provinsi yang jumlah penduduknya paling banyak memilih untuk mengosongkan hak suaranya, dengan jumlah berkisar 5,8 juta jiwa dengan presentase 17,43% dari total pemilih di Jawa Barat. Posisi kedua yaitu Jawa Tengah yang berjumlah pemilih yang abstain sebanyak 5,52 juta jiwa atau 19,79%. Diikuti oleh Jawa Timur dengan jumlah pemilih yang abstain sebanyak 5,4 juta jiwa atau 17,47%. Jumlah pemilih yang abstain di Sumatera Utara dan Jakarta masing-masing sebanyak 2,14 juta jiwa (21,97%) dan 1,33 juta jiwa (17,21%). Sedangkan, jumlah pemilih yang abstain di Banten sebanyak 1,32 juta jiwa atau 16,29%. Lampung menempati posisi keenam dengan jumlah pemilih yang abstain sebanyak 1,17 juta jiwa atau 19,4%. Di luar negeri, jumlah warga Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 1,14 juta jiwa atau 57,46%.

Berikut diagram jumlah pemilih golput dalam pemilu tahun 2004 – 2019.

PENTINGNYA HAK PEMILIHAN UMUM DALAM PROSES DEMOKRATISASI



Kami telah mengumpulkan data melalui survei terhadap 100 lebih responden. Survei ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024.

Hasil dari survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menggunakan hak pilihnya. Dari 119 responden terdapat 54,6% responden yang menggunakan hak pilihnya. Sedangkan 45,4% responden memilih untuk tidak mempergunakan hak pilihnya. Berikut ini kami lampirkan hasil dari survei yang telah kami lakukan.



Hak untuk memilih dalam pemilihan umum dianggap sebagai pondasi kunci dalam proses demokratisasi suatu negara karena memungkinkan warga negara untuk secara langsung berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan pemerintah, yang merupakan dasar

dari sistem pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat. Hak ini juga mencerminkan nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, dan keadilan dalam suatu masyarakat. Di banyak negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum secara berkala dianggap sebagai simbol dan standar bagi sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama dari tingkat demokrasi suatu negara, karena dalam proses tersebut, rakyat menggunakan hak suaranya, menjalankan hak politiknya, dan secara langsung menentukan pilihan mereka secara bebas.

Partisipasi masyarakat memiliki peran krusial dalam struktur demokrasi, karena demokrasi didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keyakinan bahwa pemerintah harus mendapat restu dari warga negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu sebagai alat untuk menjalankan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan aktif masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pemilihan umum yang demokratis, beberapa langkah dapat diambil:

1. Edukasi Pemilu

Menjelaskan apa itu Pemilihan Umum kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dan bagaimana prosesnya dilaksanakan.

2. Pelatihan Pemilih

Menyediakan pelatihan politik kepada pemilih, terutama yang baru, agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka.

3. Peran Partai Politik

Mendorong partai politik untuk lebih aktif dalam memilih kandidat dan melakukan kampanye untuk mencerminkan aspirasi masyarakat.

4. Peran Media

Memanfaatkan media untuk menyebarkan informasi tentang pemilu dan kandidat, serta memberikan ruang untuk debat dan dialog publik.

5. Pemantauan Pemilu

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu untuk memastikan proses yang adil dan transparan.

6. Penelitian dan Survei Opini

Melakukan penelitian dan survei untuk memahami pandangan pemilih dan membagikan temuan kepada publik. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan dapat

meningkatkan partisipasi warga dalam pemilu, yang akan menguatkan demokrasi dan representasi masyarakat dalam pemerintahan.

SIMPULAN

Karna hak suara yang digunakan untuk memilih dalam pemilihan umum merupakan pondasi yang penting sebagai acuan berprosesnya demokratisasi dan sebagai bentuk masyarakat dapat langsung berpartisipasi dengan menentukan pilihan mereka maka angka golongan putih di masyarakat harus diturunkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan edukasi mengenai pemilu dan melakukan pelatihan dalam melaksanakan pemilu. Adanya edukasi mengenai pemilu dapat menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak suara mereka dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin sebuah negara dan adanya pelatihan dalam melaksanakan pemilu dapat menunjukkan kegiatan pemilu bukanlah suatu rangkaian kegiatan yang rumit.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Pemilih Golput saat Pemilu, Turun Drastis pada 2019 - Dataindonesia.id. (n.d.).
- HARIMURTI, Y. W. (2022). Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi. *RechtIdee*, 17(1), 1–12.
- Maria, L., & Marendra, D. (2020). *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Nahuddin, Y. E. (2017). Pemilihan Umum dalam Sistem Demokrasi Perspektif Sila ke-4 Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2).
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Juristic*, 1(01), 22–32.
- Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. (n.d.). Retrieved from <https://umsu.ac.id>
- SENTOLO - Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu. (n.d.). Retrieved from <https://kulonprogokab.go.id>
- Sirajuddin, dkk. (2009, June). Jurnal Konstitusi. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 11(1).